

**Rencana Strategis Inspektorat  
2019 - 2023**

---

**Visi**

MEWUJUDKAN KOTA BIMA YANG BERKUALITAS DAN SETARA MENUJU MASYARAKAT YANG MAJU DAN MANDIRI

**Misi**

1. MENGHADIRKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DENGAN MENGEDEPANKAN PRINSIP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK.

**Strategi**

1. Peningkatan pengawasan internal dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan
2. Mendorong kepatuhan OPD untuk menindaklanjuti penyelesaian hasil pemeriksaan
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja Instansi Pemerintah
4. Penguatan Sistem pengendalian Interen Pemerintah daerah
5. Penguatan Sistem pengendalian Interen Pemerintah daerah

## **Kebijakan**

1. Peningkatan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan melalui koordinasi dan sinergitas antar Aparat Pengawas Pemerintah Daerah maupun dengan Objek Pemeriksaan
2. Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan kode etik dan standart yang ditetapkan peraturan perundangan
3. Meningkatkan pemantauan tindaklanjut hasil pemeriksaan secara berkala,
4. Pemanfaatan hasil evaluasi tindaklanjut penyelesaian hasil pemeriksaan secara berkala sebagai bahan pertimbangan pemberian penghargaan dan sanksi
5. Optimalisasi peran PPKD, TPKD dan MP-TGR dalam penyelesaian temuan hasil pemeriksaan
6. Meningkatkan manfaat atau nilai tambah dari pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional dengan memantapkan peran Inspektorat sebagai Counsultant Partner
7. Meningkatkan Sistem monev kinerja pada setiap tingkatan manajemen
8. Menjadikan hasil monev sebagai pedoman perbaikan kinerja pada tingkat manajemen berikutnya serta sebagai bahan pertimbangan reward dan punishment.
9. Meningkatkan Sistem monev kinerja pada setiap tingkatan manajemen
10. Meningkatkan manfaat atau nilai tambah dari pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional dengan memantapkan peran Inspektorat sebagai Counsultant Partner
11. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Per Tahun					
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1.1 Menurunnya Temuan Hasil Pengawasan	1.1.1	Persentase OPD yang tidak mendapat temuan bersifat materiil	Persen (%)	60.98	70.73	80.49	90.24	100
			1.1.2	Persentase tindak lanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK	Persen (%)	90	92	94	96	98
			1.1.3	Level/Nilai Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi NTB Terhadap Maturitas SPIP Kota Bima	Angka	2.8	3.1	3.4	3.6	3.8
			1.1.4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal B	Persen (%)	93.09	82.35	88.24	92.12	100
			1.1.5	Persentase Penurunan temuan Hasil Pengawasan	Persen (%)					
			1.1.6	Persentase tindak lanjut penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan	Persen (%)					
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Meningkatnya Nilai SAKIP dan LPPD	2.1.1	Persentase peningkatan Nilai SAKIP dan LPPD	Persen (%)					42.86